



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : BIDANG ADMINISTRASI UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU IDHAM HALID
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 32450

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 876.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 796 m2/128 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah Seluas 100 m2 di LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 166.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X RIDE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 94.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 265.900.302**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.401.900.302**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.401.900.302

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.